



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat target, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L, dan Renstra Provinsi Sumatera Utara, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan kabupaten labuhanbatu selatan, sesuai dengan visi RPJMD "**Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern.**"

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana strategis ini, semoga ke depan dapat menjadi landasan dan dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



AGUSTINA NASUTION, SE, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660808 198803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	8
4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1. Gambaran Pelayanan Dinas.....	12
2. Permasalahan Pelayanan.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
1. Tujuan Renstra PD 2025-2029.....	36
2. Sasaran Renstra PD 2025-2029.....	36
3. Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan Renstra dan Sasaran PD Tahun 2025-2029.....	44
4. Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025-2029.....	45
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
1. Uraian Program	47
2. Uraian Kegiatan.....	47
3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	115
4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	156
5. Target Pencapaian Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025-2029 melalui IKU.....	157
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK.....	158
BAB V PENUTUP	
Penutup	162

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	25
Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana	26
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024	27
Tabel 2.4	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	34
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .	45
Tabel 3.4	Penahapan Renstra PD	44
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan /SubKegiatan Renstra PD	48
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan Dan Pendanaan	115
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	156
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	157
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas	3
Gambar 3.1	Konsep Renstra Dinas	37
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas	38
Gambar 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	45

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	8
4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1. Gambaran Pelayanan Dinas.....	12
2. Permasalahan Pelayanan.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
1. Tujuan Renstra PD 2025-20029.....	36
2. Sasaran Renstra PD 2025-20029.....	36
3. Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan Renstra dan Sasaran PD Tahun 2025-2029.....	44
4. Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025-2029.....	45
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
1. Uraian Program.....	47
2. Uraian Kegiatan.....	47
3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	115
4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	156
5. Target Pencapaian Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025-2029 melalui IKU.....	157
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK.....	158
BAB V PENUTUP	
Penutup.....	162

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	25
-----------	---	----

Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana	26
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024	27
Tabel 2.4	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	34
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .	45
Tabel 3.4	Penahapan Renstra PD	44
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan /SubKegiatan Renstra PD	48
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan Dan Pendanaan	115
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	156
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	157
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas	3
Gambar 3.1	Konsep Renstra Dinas	37
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas	38
Gambar 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan; (2) Penyusunan rancangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

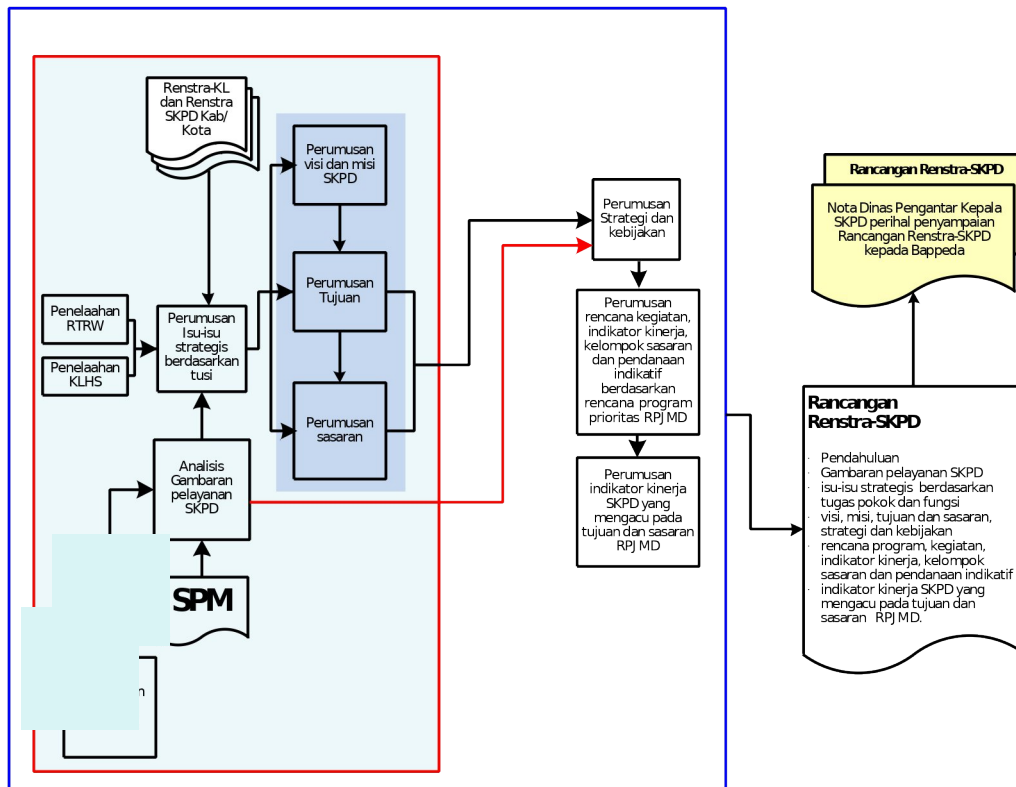
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan

mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Tugas dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
30. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Seri D Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 2 Seri D Nomor 02).
35. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06)

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
3. menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kurun waktu lima tahun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Memuat :

- 1.1 Latar belakang yang mengemukakan pengertian Renstra PD, fungsi, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
- 1.2 Landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya.

- 1.3 Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
- 1.4 Sistematika penulisan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Memuat :

- 2.1 Gambaran pelayanan meliputi :
 - a. Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi PD;
 - b. Sumber Daya PD;
 - c. Kinerja Pelayanan PD;
 - d. Kelompok Sasaran layanan.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Statregis PD memuat :
 - a. Permasalahan pelayanan PD;
 - b. Isu Statregis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat :

- 1.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029;
- 1.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029;
- 1.3 Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025 – 2029;
- 1.4 Arah Kebijakan PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025 2029.

Bab IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat :

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target pencapaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD;
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

Bab V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

- anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan pemetaan, perkiraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
 - f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan dan kader KB;
 - g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 - h. Pelaksanaan pelayanan KB;
 - i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur organisasi, tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

- a. Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- f. Bidang Pemenuhan Hak Anak;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

I. SEKRETARIAT

1) Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian di bagian umum dan kepegawaian, keuangan, program, pelaporan dan aset serta mengkoordinasikan tugas kepada bidang dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2) Uraian tugas Sekretariat :

- a. Merencanakan kebijakan operasional sekretariat berdasarkan kebijakan umum, rencana strategis dan rencana kerja dinas sebagai pedoman kerja;
- b. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekretariat sesuai rencana yang ditetapkan;
- e. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang bersangkutan sesuai tugas pokoknya;
- f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan materi dan penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD, rencana kerja (Renja), KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD, DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan dan meneliti kelengkapan SPP-LS, SPP- UP, SPP-GU, SPP- TU, SPP-LS gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. Mengkoordinasikan dan mengelola surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, pengguna sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- j. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggara upacara, apel, acara keagamaan dan kegiatan kantor lainnya serta rapat dinas, rapat dinas dengan instansi pemerintah maupun dengan swasta dan penerima tamu;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan instansi terkait, mendokumentasikan berita dan penyelenggara hubungan masyarakat serta pendokumentasikan produk hukum kepegawaian;
- l. Menyelia penyelesaian administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, DUK, SKP dan administrasi kepegawaian lainnya;
- m. Menilai bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada kepala dinas secara lisan maupun tulisan; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dinas; \Penyelenggara administrasi umum di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan serta menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. Penyelenggara urusan rumahtangga dinas; dan
- e. Penyelenggara urusan rumahtangga dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1) Tugas :

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

2) Uraian tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- c. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi pada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
- j. Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Penyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungan;
- l. Menyiapkan penyelenggaraan upacara, acara keagamaan dan penerima tamu;
- m. Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
- n. Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala dinas dan kegiatan dinas serta mendokumentasikan berita;
- o. Menyiapkan penyelenggara jumpa pers dan hubungan masyarakat jika dibutuhkan;
- p. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- q. Menyelesaikan administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, DUK, SKP, dan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. Memberi usulan dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah kepegawaian di lingkungan dinas;

- s. Menilai kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kinerja;
- t. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada sekretaris baik melalui lisan maupun tulisan;
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

1) Tugas :

Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang mencakup pada urusan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana, dan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

2) Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan Kota;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten dan Kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berenana;
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);

- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1) Tugas :

Bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup pada urusan jaminan berkeluarga berencana, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2) Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;
- i. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan ber KB di Kabupaten;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1) Tugas :

Bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, yang mencakup pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga, dan pengarusutamaan gender bidang sosial, politik dan hukum.

2) Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta bina kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta bina kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;
- e. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG;
- f. Melaksanakan kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- g. Melaksanakan pengintegrasian kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- i. Melaksanakan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha serta pengembangan dan penguatan jaringan kerjanya untuk pelaksanaan PUG;
- j. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan advokasi dengan berbagai instansi dan institusi dalam upaya pengayoman dan perlindungan serta menegakkan hak-hak kaum perempuan agar terhindar dari kekerasan dan trafiking terhadap perempuan;
- k. Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat dan berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada seksi untuk diproses lebih lanjut;
- l. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran kegiatan bidang;
- m. Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh seksi;
- n. Memberikan petunjuk teknis administrative dan mengarahkan tugas/pekerjaan seksi;
- o. Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh seksi;
- p. Memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan seksi;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

1) Tugas :

Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak, dan informasi data gender dan anak.

2) Fungsi :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran dan kegiatan bidang Pemenuhan Hak Anak;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seksi tumbuh kembang anak;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seksi pemenuhan hak anak;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seksi Informasi Data Gender dan Anak;

- e. Menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan peran masyarakat, dunia usaha dalam memperjuangkan hak-hak anak serta pengendalian potensi dan peningkatan kualitas anak;
- f. Melaksanakan program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan anak dengan instansi terkait;
- g. Melaksanakan kebijakan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- h. Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada seksi untuk diproses lebih lanjut;
- i. Meneliti setiap pengajuan konsep naskah yang diajukan seksi;
- j. Memberikan petunjuk teknis dan administrasi dan mengarahkan tugas dan pekerjaan seksi;
- k. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

1) Tugas :

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah kerjanya.

2) Fungsi :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Melaksanakan teknis operasional pelayanan keluarga berencana yang meliputi kegiatan penyediaan Data dan Informasi Data Mikro Keluarga, Kegiatan Kemitraan, Penyelenggaraan Operasional, Bimbingan dan Penyuluhan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR), Keluarga Sejahtera (KS), Pembentukan dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) dan Kelompok Kegiatan (Poktan), serta Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Melakukan pembinaan terhadap petugas lapangan KB;
- d. Menyelenggarakan Tata Usaha UPTD;

- e. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. SUB BAGIAN TATA USAHA

1) Tugas :

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja unit pelaksana teknis dinas tingkat kecamatan.

2) Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;
- b. Menyusun petunjuk teknis dan rincian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan program dan pelaporan serta keuangan;
- c. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan tugas subag Tata Usaha;
- d. Menyusun pedoman pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan program dan pelaporan serta keuangan;
- e. Melaksanakan koreksi terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah tersusun;
- f. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan program yang telah dibuat dan peraturan yang berlaku;
- g. Menghimpun bahan-bahan laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja;
- h. Menyusun berbagai data bahan pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- i. Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan bulanan, triwulan dan tahunan;

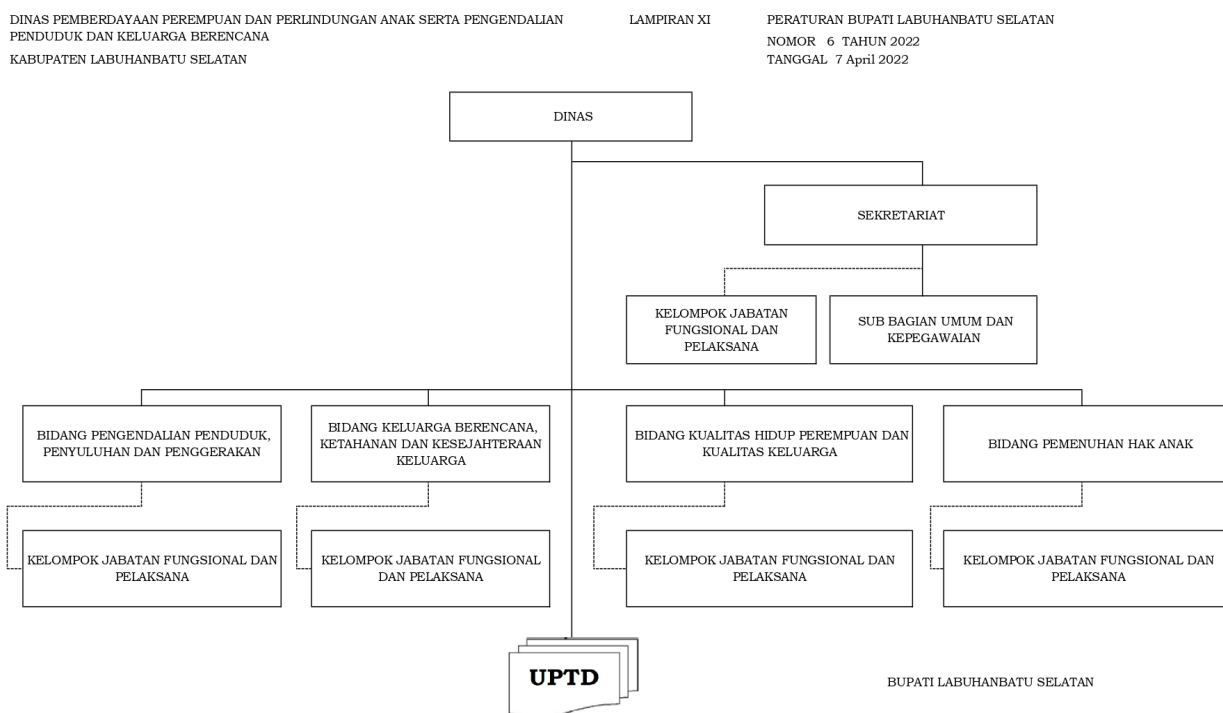
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Struktur Organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 42 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Kepala Bidang
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	1	3	1	5
3	D1	0	1	0	0	1
4	D3	0	1	3	1	4
5	S1	4	17	2	4	27
6	S2	0	5	0	0	5
7	S3	0	0	0	0	0

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan tingkat pendidikan.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil Dinas Kepala Dinas)	1	0	1
2	Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil Dinas Sekretaris)	0	1	1
3	Kendaraan Dinas Roda Dua	33	3	36
4	Mobil Unit Penerangan KB	0	1	1
5	Mobil Unit Pelayanan KB	1	0	1
6	Mobil Pengangkut Akseptor KB	1	0	1
7	Mobil Pengangkut Alokon	1	0	1
8	Mobil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0	1

9	Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil KPAD)	1	0	1
---	---	---	---	---

Ket: Sumber Data DP3AP2KB per 31 Desember 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Indikator Kinerja Utama

Adapun tujuan dari Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
2. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2020-2024, menurut indikator.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Periode Renstra 2020 – 2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Tujuan : 1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender 2. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak Perempuan dan anak 3. Mewujudkan pengendalian penduduk 4. Meningkatkan kualitas keluarga dan Pembangunan keluarga																		

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Sasaran : 1.Meningkatnya pemberdayaan gender 2. Meningkatnya pemenuhan hak anak 3. Menurunnya angka kelahiran 4. Meningkatnya ketahanan keluarga																	
		1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	67	67,8	68,6	70	70,5	64,69	65,61	65,61	66,27	66,27	97	97	96	95	94
		2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	50,96	53,4	55,84	58,28	60,7	60,62	59,32	59,32	60,79	60,79	116	111	109	104	100
		3 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Pelayanan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	91	91	93	93	95	91	91	93	95	95
		4 Predikat/Skor KLA	Nilai	Prata ma	Prata ma	Prata ma	Mady a	Mady a	-	-	Prata ma	-	-	0	0	50%	0	0
		5 Indeks Pembangunan Keluarga	Persen	0	0	0	0	0	52.8	54.98	59.65	60.21	60.21					
		6 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Persen	2.85	2.8	2.7	2.65	2.65	2.88	2.76	2.67	2.36	2.36	101	98	98	89	90

2.1.4 Kelompok Sasaran Strategis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka kelompok sasaran strategis Dinas P3AP2KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi perempuan, anak, keluarga, remaja, dan pasangan usia subur, termasuk perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta korban kekerasan. Selain itu, sasaran strategis juga mencakup masyarakat dan kelembagaan pendukung, seperti kader KB, kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan dan mitra pembangunan yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dilakukan terhadap seluruh bidang urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Permasalahan yang dihadapi pada umumnya timbul dari belum optimalnya pemanfaatan potensi yang ada, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta masih adanya tantangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Ketidaksetaraan Akses dan Kesempatan (Pendidikan dan pekerjaan)
 - 3) Beban Ganda Perempuan
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.

- 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.
- g. Permasalahan terkait pengendalian penduduk
- 1) Laju Pertumbuhan penduduk yang Masih Tinggi
 - 2) Penyebaran penduduk yang belum merata
 - 3) Indeks Pembangunan keluarga yang masih rendah
 - 4) Kurangnya advokasi dan KIE program Banggakencana sesuai dengan karakter wilayah dan segmentasi sasaran.
- h. Permasalahan terkait keluarga berencana
- 1) Unmeetneed tinggi
 - 2) Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
 - 3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga penyuluh KB
 - 4) Distribusi alokon belum merata
 - 5) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- i. Permasalahan terkait keluarga sejahtera
- 1) Masih ditemukan keluarga PS dan KS I
 - 2) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap

Isu strategis urusan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentunya tidak lepas dari isu – isu yang ada saat ini mulai dari tingkat Global, nasional, dan Regional. Adapun isu strategis secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi SDM: Jumlah perempuan, anak, remaja, dan keluarga usia produktif yang besar.	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.	Kesetaraan Gender dan Keadilan Sosial.	Isu kesenjangan gender global dan perlindungan kelompok rentan.	Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan ekonomi perempuan.	Kesenjangan peran perempuan dan akses ekonomi di wilayah kabupaten/kota.	Rendahnya kemandirian dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Potensi Kelembagaan: Kader KB, PIK-R, Kampung KB, Forum Anak, dan UPTD PPA.	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya layanan perlindungan.	Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.	Isu kekerasan berbasis gender dan eksploitasi anak.	Kebijakan nasional perlindungan perempuan dan anak serta KLA.	Tingginya kasus kekerasan dan pernikahan usia dini di daerah.	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
Potensi Anak dan Remaja: Jumlah anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan	Kesehatan Reproduksi dan	Tantangan kualitas	Pencegahan perkawinan anak	Masih tingginya praktik	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan

dan remaja usia sekolah dan nonsekolah.	pencegahan perkawinan usia dini.	Pembangunan Manusia.	generasi dan bonus demografi.	dan percepatan KLA	perkawinan usia dini.	kualitas tumbuh kembang.
Potensi Keluarga: Keluarga muda dan keluarga usia subur yang besar.	Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga.	Kesehatan Remaja dan Kependudukan.	Isu kesehatan reproduksi remaja dan perilaku berisiko.	Program Generasi Berencana (GenRe)	Kerentanan remaja terhadap pernikahan dini dan perilaku berisiko	Rendahnya kualitas perencanaan kehidupan remaja.
Potensi Remaja: PIK-R dan kelompok remaja desa/kelurahan.	Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB.	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.	ekanan pertumbuhan penduduk global.	Penguatan program KB dan percepatan penurunan stunting	Angka kelahiran dan stunting yang masih perlu ditekan.	Belum optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan KB.
Potensi Kelembagaan Desa : Kampung KB dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.	Terbatasnya kapasitas SDM, data, dan koordinasi lintas sektor.	Tata Kelola Pemerintahan dan Kelembagaan.	Tuntutan tata kelola layanan publik yang inklusif.	Integrasi lintas sektor PUG, PPA, dan Bangga Kencana.	Sinergi OPD dan desa belum optimal.	Lemahnya sinergi dan kapasitas kelembagaan pendukung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sesuai dengan misi Pembangunan daerah ke 1, yaitu : **“Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat ”**. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang ke-1 yaitu “Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif. Tujuan daerah tersebut diturunkan menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas.

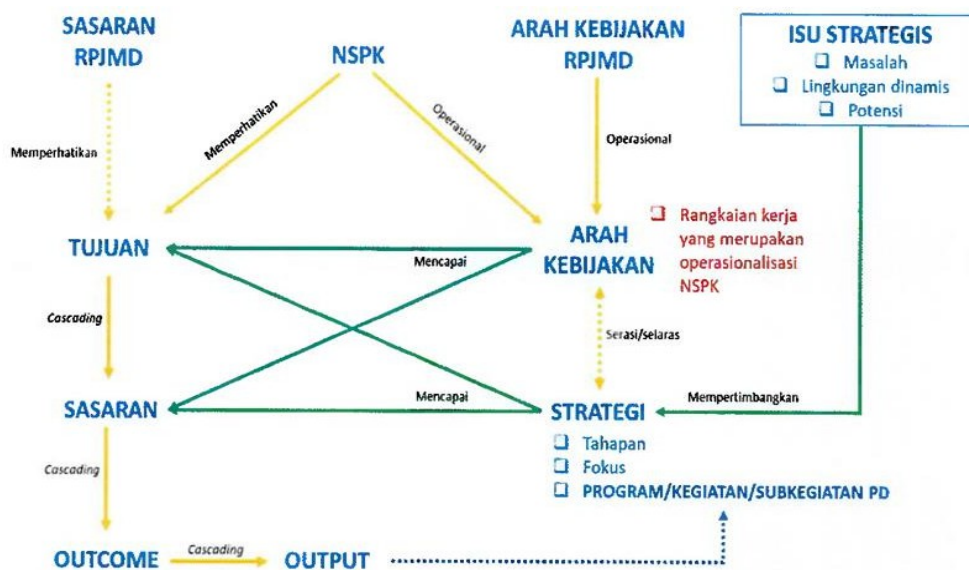
3.2. Sasaran Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 - 2029

Memperhatikan misi ke-1 dan tujuan ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD maka sasaran dari tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

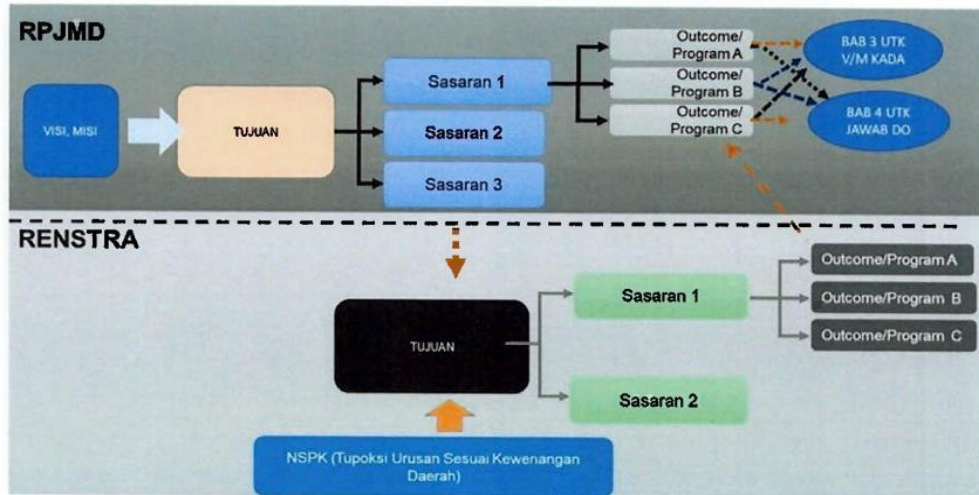
1. Mewujudkan Kesetaraan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan.
2. Mewujudkan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap Perempuan, serta melindungi hak-hak asasi Perempuan.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup keluarga

4. Mewujudkan peningkatan system data gender dan anak serta mendukung perencanaan dan kebijakan Pembangunan yang responsif gender dan peduli anak
5. Menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
6. Mewujudkan rasa aman dan jaminan terhadap haka nak, yang diberikan dalam situasi dan kondisi tertentu.
7. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang
8. Meningkatkan pelayanan KB, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta membangun keluarga kecil
9. Meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Gambar 3.1.
Konsep Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Untuk mencapai tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan di tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan, berikut Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, efektif, efisien, lincah serta responsif.

Adapun indikator tujuan dan sasaran dari renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
Membangun SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang hebat	Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan,		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase	66.45%	69.77%	73.26%	76.92%	80.77%	84.81%	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persentase	0.51%	0.4% ⁹	0.47%	0.46%	0.44%	0.42%	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persentase	95.55%	96.00%	96.55%	97.00%	97.55%	98.00%	

kesehatan, dan perlindungan social yang ada	Sasaran 1 : Terwujudnya layanan Pendidikan yang berkualitas dan merata	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persentase	55%	56%	57%	58%	59%	60%	
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	5%	5,22%	5,29%	5.25%	5.66%	5.69%	
	Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
		Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar	Indeks	30	30	30	30	30	30	
		Tingkat	Persentase	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

			pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan								
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	90	92	93	94	95	96	
			Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%%	100%	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	95,55	96	96,55	97	97,55	98	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62.47	63.73	64.00	65.26	66.53	67.79	
		Sasaran 1 :	TFR (Angka	Orang	2.65	2.66%	2.66	2.65	2.65	2.64	

		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Kelahiran Total)								
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Spesific Fertility</i>)	Kelahiran per 1000 WUS 1519 Tahun	19.3	18.6	18.1	17.6	17.2	16.9	
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (CPR)	Persentase	46.78%	49.3%	50.8%	51.2%	53%	53.8%	
			Persentase Kebutuhan Ber-KByang tidak terpenuhi	Persentase	24.8%	23.65%	22.5%	21%	20.5%	20%	
			Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

			ketahanan keluarga								
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 – 2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengandalkan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan data gender, anak, dan kependudukan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan koordinasi lintas sektor.	Peningkatan akses dan kualitas layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang responsif gender dan inklusif.	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguatan ketahanan dan kualitas keluarga.	Integrasi program PUG, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk lintas perangkat daerah serta penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.	Stabilisasi dan keberlanjutan capaian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk menuju keluarga berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.

3.5 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 - 2029

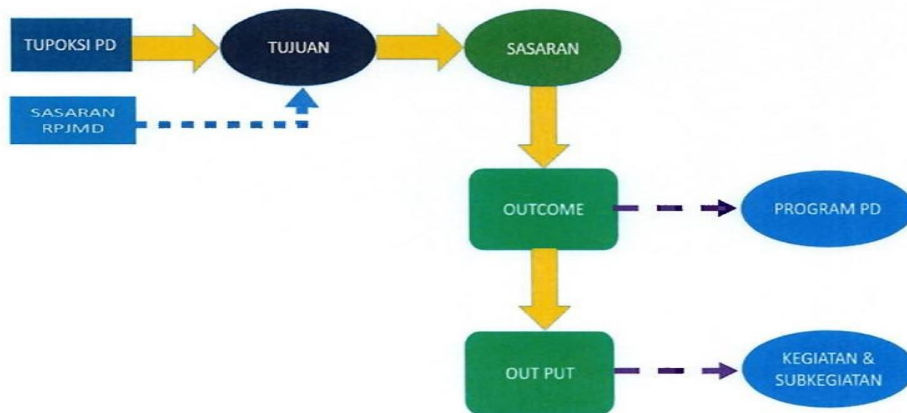
Berdasarkan isu strategis pembangunan dan strategi pentahapan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan maka arah kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 2025 – 2029, sebagaimana Tabel beriku:

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi Nspk	Arah Kebijakan Rpjmd	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan memperhatikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan	Penguatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, serta pembangunan keluarga melalui peningkatan akses, kualitas, dan integrasi layanan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kelompok rentan.	
			Penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang terintegrasi, merata, dan berkualitas sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial daerah.	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025 (diolah)

Gambar di atas menggambarkan alur keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD), sasaran RPJMD, tujuan, sasaran, hingga program dan kegiatan. Dimulai dari Tupoksi PD dan sasaran RPJMD yang menjadi dasar penetapan tujuan, lalu tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran spesifik perangkat daerah. Setiap sasaran kemudian dioperasionalkan untuk menghasilkan outcome yang diwujudkan dalam bentuk program perangkat daerah, serta output yang diturunkan lagi menjadi kegiatan dan subkegiatan. Dengan demikian, gambar ini menunjukkan proses berjenjang (cascading) dari arah kebijakan daerah hingga ke level teknis operasional perangkat daerah, sehingga setiap kegiatan dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas.

Tabel 4.2. berikut menampilkan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dilakukan:

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang dan jasa. Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	8	9
Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		

	perlindungan sosial yang adaptif						
		terwujudnya layanan Pendidikan yang berkualitas dan merata					
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan				
				Terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta peningkatan peran		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

				perempuan dalam pembangunan daerah.			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan	Sub kegiatan Pendampingan	

					pendampingan	Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	

						Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Sub kegiatan Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan	Sub kegiatan Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan	

					pendampingan	perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat,	Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di	

					perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Sub kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan	Sub kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	

					Perempuan	kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Dokumen KIE Pemberdayaan Perempuan	Sub kegiatan Pengembangan Kominikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

		Meningkatnya perlindungan social yang adaptif			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Sub kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan	Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	

					Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Sub kegiatan Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota & layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub kegiatan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat	Sub kegiatan layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

					Kabupaten/Kota		
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub kegiatan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub kegiatan layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat	Sub kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

					Kabupaten/Kota		
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	

						Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan social yang adaptif					
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
				Terlaksananya pembinaan dan penguatan kualitas keluarga dalam mendukung		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				kesetaraan gender serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak.			
						Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup	Sub Kegiatan layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	

					Kabupaten/Kota		
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	

					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif					
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
				Tersedianya dan dimanfaatkannya data gender dan anak sebagai dasar perencanaan,		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di	

				pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Sub kegiatan Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
					Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Sub kegiatan Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif					

			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	
				Terlaksananya penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

					Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	

					Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	

						Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup	

					Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<p> penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota </p>	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	<p> Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota </p>	

					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif					

			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
				Terlaksananya upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penguatan kerja sama	

					lintas perangkat mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak daerah untuk Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA		
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	

					KtA tingkatKab/Kota		
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD)	Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD)	

					Kewenangan Kab/kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau	Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

					Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Sub Kegiatan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

					Kabupaten/Kota		
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban	Sub Kegiatan	

					Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan	

						edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas	

					bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
					jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif					
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/</i> TFR)	Program Pengendalian Penduduk	
				Terlaksananya	Angka Kelahiran	Kegiatan	

				program pengendalian penduduk dan pelayanan Keluarga Berencana secara berkelanjutan.	Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> 15-19)	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	

					Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang	Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak	

					Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Sub Kegiatan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada	

					Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
					Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan	

					Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Sub Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	
						Kegiatan Pemetaan Perkiraan	

						Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	

					Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dan Pelayanan KB	
					Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui	

					Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Sub Kegiatan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Sub Kegiatan Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	

					(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
					Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Sub Kegiatan Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif					
			Meningkatnya pemberdayaan		Angka Prevalensi	Program Pembinaan	

			dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Keluarga Berencana (KB)	
				Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi	

					Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sarana KIE Program Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	

					<p>Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</p>	Lokakarya (Minilok)	
					<p>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p>	<p>Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p>	
					<p>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga</p>	<p>Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana</p>	

					Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
						Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana	Sub Kegiatan	

					Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,	

					<p>Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</p>	<p>Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</p>	
						<p>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p>	
					<p>Jumlah Laporan Pengendalian</p>	<p>Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian</p>	

					Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan	

					dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	KB	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	

					Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Reproduksi	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
					Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	
					Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	

					Penunjang Pelayanan KB		
					Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
					Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
						Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di	Sub Kegiatan	

					Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif					
			Meningkatnya		Presentase	Program	

			pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan penguatan Keluarga Sejahtera.		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan	

					dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Menuju Keluarga Berkualitas	
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

					Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

					Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
					Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam

					Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	

					(Indeks Pembangunan Keluarga)	(Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok	

					<p>Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk</p>	<p>Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</p>	
					<p>Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p>	<p>Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p>	
						<p>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi</p>	

						Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
						Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	

						PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Sub Kegiatan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

Adapun susunan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Periode Tahun 2025-2029 terdapat pada Tabel 4.3, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan/ Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		9.920.515.281		9.375. 464.96 4		10.605.0 00.000		11.740.5 00.000		13.029.5 50.000		13.313.9 05.000		14.532.295.500	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		6.499.950.616		5.529. 109.06 7		8.505.00 0.000		9.430.50 0.000		10.488.5 50.000		10.518.8 05.000		11.457.685.500	
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5.431.236.321	100%	4.814. 618.02 0	100%	6.560.00 0.000	100%	7.291.00 0.000	100%	8.135.10 0.000	100%	7.930.01 0.000	100%	8.610.011.000	
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.009.458.803	100%	3.840. 989.78 4	100%	4.095.00 0.000	100%	4.504.50 0.000	100%	4.954.95 0.000	100%	5.450.44 5.000	100%	5.995.489.500	
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	3.941.059.115	30 orang/14 bulan	3.794. 430.90 0	30 orang/14 bulan	4.000.00 0.000	33 orang/14 bulan	4.400.00 0.000	33 orang/14 bulan	4.840.00 0.000	35 orang/14 bulan	5.324.00 0.000	35 orang/14 bulan	5.856.400.000	DP3AP2KB

	ASN														
2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.999.688	2 Dokume n	25.998 .884	2 Dokume n	35.000.0 00	2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		DP3AP2KB
								38.500.0 00		42.350.0 00		46.585.0 00		51.243.500	
2.08.01.2.02.0003Pel aksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	38.400.000	2 Dokume n	20.560 .000	2 Dokume n	60.000.0 00	2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		DP3AP2KB
								66.000.0 00		72.600.0 00		79.860.0 00		87.846.000	
2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	0 Dokume n	-	2 Dokume n	-	2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		DP3AP2KB
								-		-		-		-	
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	52.233.152	100%	-	100%	100.000. 000	100%	110.000. 000	100%	121.000. 000	100%	133.100. 000	100%	146.410.000	
2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52.233.152	0 Paket	-	3 Paket	100.000. 000	3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		DP3AP2KB
								110.000. 000		121.000. 000		133.100. 000		146.410.000	
2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	0 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		DP3AP2KB
								-		-		-		-	
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	354.809.030	100%	181.55 2.950	100%	295.000. 000	100%	324.500. 000	100%	356.950. 000	100%	392.645. 000	100%	431.909.500	
2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.995.588	2 Paket	11.992 .730	2 Paket	30.000.0 00	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		DP3AP2KB
								33.000.0 00		36.300.0 00		39.930.0 00		43.923.000	

2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	DP3AP2KB
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.996.109	2 Paket	3.734.464	2 Paket	30.000.000	2 Paket	33.000.000	2 Paket	36.300.000	2 Paket	39.930.000	2 Paket	43.923.000	DP3AP2KB
2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.196.614	5 Paket	10.999.756	5 Paket	30.000.000	5 Paket	33.000.000	5 Paket	36.300.000	5 Paket	39.930.000	5 Paket	43.923.000	DP3AP2KB
2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	312.620.719	2 Dokumen	-	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.050.000	2 Dokumen	6.655.000	2 Dokumen	7.320.500	DP3AP2KB
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	154.826.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	220.000.000	2 Laporan	242.000.000	2 Laporan	266.200.000	2 Laporan	292.820.000	DP3AP2KB
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	174.210.609	100%	-	100%	1.050.000.000	100%	1.230.000.000	100%	1.468.000.000	100%	596.200.000	100%	542.820.000	
2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	605.000.000	0	-	0	-	DP3AP2KB
2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	350.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	330.000.000	0	-	DP3AP2KB
2.08.01.2.07.0005	Jumlah Paket				3 Unit		100 Unit		100 Unit		0		0		DP3AP2KB

Pengadaan Mebel	Mebel yang Disediakan	-		-		100.000.000		110.000.000		121.000.000		-		-	
2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24.210.609	1 Unit	-	10 Unit	50.000.000		0	-	10 Unit	200.000.000	-	10 Unit	250.000.000	DP3AP2KB
2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150.000.000		-	1 Unit	200.000.000		1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	266.200.000	1 Unit	292.820.000	DP3AP2KB
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	530.665.692	100%	525.499.671	100%	700.000.000	100%	770.000.000	100%	847.000.000	100%	931.700.000	100%	1.024.870.000	
2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	DP3AP2KB
2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	74.665.692	2 Laporan	69.499.671	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	220.000.000	2 Laporan	242.000.000	2 Laporan	266.200.000	2 Laporan	292.820.000	DP3AP2KB
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	456.000.000	2 Laporan	456.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	550.000.000	2 Laporan	605.000.000	2 Laporan	665.500.000	2 Laporan	732.050.000	DP3AP2KB
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	309.859.035	100%	266.575.615	100%	320.000.000	100%	352.000.000	100%	387.200.000	100%	425.920.000	100%	468.512.000	
2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	71.890.000	2 Unit	71.890.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	99.000.000	3 Unit	108.900.000	3 Unit	119.790.000	3 Unit	131.769.000	DP3AP2KB

	dibayarkan Pajaknya													
2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	218.279.035	30 Unit	174.995.615	30 Unit	200.000.000	30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit	DP3AP2KB
								220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000
2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19.690.000	20 Unit	19.690.000	20 Unit	30.000.000	20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000
2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	-	0 Unit		1 Unit	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	DP3AP2KB
								-		-		-		-
2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	- Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	251.379.553	70%	129.999.311	73%	390.000.000	73%	429.000.000	75%	471.900.000	75%	519.090.000	80%	570.999.000
			65%		67%		67%		71%		71%		73%	
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	29.985.490	100%	29.999.311	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	175.692.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/K	-		-	2 Dokumen	-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	DP3AP2KB
								-		-		-		-

	ota													
2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	29.985.490	2 Laporan	29.999.311	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000	43.923.000	
2.08.02.2.01.0017 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	-		-	1 Kebijakan	-	1 Kebijakan	-	1 Kebijakan	-	1 Kebijakan	1 Kebijakan	-	DP3AP2KB
2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	-		-	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	43.923.000	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000	43.923.000	
2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	43.923.000	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000	43.923.000	
2.08.02.2.01.0015 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	43.923.000	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000	43.923.000	
2.08.02.2.01.0016 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	-		-	100 Orang	-	100 Orang		100 Orang		100 Orang	100 Orang	-	DP3AP2KB
								-		-		-	-	
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	-	-	100%	-	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	87.846.000	

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota															
2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	-	DP3AP2KB
2.08.02.2.02.0005 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	-	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	-	DP3AP2KB
2.08.02.2.02.0006 Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	-	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	-	DP3AP2KB
2.08.02.2.02.0007 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	-	DP3AP2KB
2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan	-	-	100 orang	30.000.000	100 orang	33.000.000	100 orang	36.300.000	100 orang	39.930.000	100 orang	43.923.000	-	DP3AP2KB

Kewenangan Kabupaten/Kota	sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi														
2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	-	-	100 Orang	30.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		43.923.000	DP3AP2KB
2.08.02.203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	221.394.063	100%	100.000.000	100%	210.000.000	100%	231.000.000	100%	254.100.000	100%	279.510.000	100%	307.461.000	
2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	-	-	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		43.923.000	DP3AP2KB
2.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	-	10 dokumen	30.000.000	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		43.923.000	DP3AP2KB
2.08.02.2.03.0009 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan	-	-	2 laporan	-	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		-	DP3AP2KB

perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	an lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
2.08.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	221.394.063	100 orang	100.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		DP3AP2KB
								165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000	
Pengembangan Kominikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KIE Pemberdayaan Perempuan	-		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	DP3AP2KB
3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	89.452.308	100%	79.528.438	100%	255.000.000	100%	280.500.000	100%	308.550.000	100%	339.405.000	100%	373.345.500	
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	29.980.273	100%	19.998.157	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.807.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		29.980.273	100 orang	19.998.157											DP3AP2KB
2.08.03.2.01.0003 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP	-		-	2 laporan	15.000.000	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		DP3AP2KB
								16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500	

	Kewenangan Kabupaten/Kota														
2.08.03.2.01.0004	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	24.200.000	2 Dokumen	26.620.000	29.282.000	2 Dokumen	DP3AP2KB
2.08.03.2.01.0005	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	-		-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	-	100 orang	DP3AP2KB
2.08.03.2.01.0006	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	-		-	10 Lembaga	20.000.000	10 Lembaga	22.000.000	10 Lembaga	24.200.000	10 Lembaga	26.620.000	29.282.000	10 Lembaga	DP3AP2KB
2.08.03.2.01.0007	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Kebijakan	20.000.000	1 Kebijakan	22.000.000	1 Kebijakan	24.200.000	1 Kebijakan	26.620.000	29.282.000	1 Kebijakan	DP3AP2KB
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	100%	30.000.000	100%	180.000.000	100%	198.000.000	100%	217.800.000	100%	239.580.000	263.538.000	100%	
Penyediaan Layanan Pengaduan		30.000.000	10 Layanan	30.000				-		-		-	-		DP3AP2KB

Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				.000										
2.08.03.2.02.0003 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	-	-		100 Orang	20.000.000	100 Orang	22.000.000	100 Orang	24.200.000	100 Orang	26.620.000	29.282.000	DP3AP2KB
2.08.03.2.02.0004 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-		100 Orang	20.000.000	100 Orang	22.000.000	100 Orang	24.200.000	100 Orang	26.620.000	29.282.000	DP3AP2KB
2.08.03.2.02.0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	-	-		100 Orang	20.000.000	100 Orang	22.000.000	100 Orang	24.200.000	100 Orang	26.620.000	29.282.000	DP3AP2KB
2.08.03.2.02.0006 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-		100 Orang	20.000.000	100 Orang	22.000.000	100 Orang	24.200.000	100 Orang	26.620.000	29.282.000	DP3AP2KB
2.08.03.2.02.0007 layanan medikolegal	Jumlah Perempuan	-	-		100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	-	DP3AP2KB

bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota														
2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	50.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang			DP3AP2KB
							55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	50.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang			DP3AP2KB
							55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		29.472.035	100%	29.530.281	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	29.472.035	10 Lembaga	29.530.281											DP3AP2KB
Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan	-	-												DP3AP2KB

Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Perlindungan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan														
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		DP3AP2KB
Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		DP3AP2KB
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	73.822.520	1 Puspaga	74.975.672	2 Puspaga	130.000.000	2 Puspaga	143.000.000	3 Puspaga	157.300.000	3 Puspaga	173.030.000	5 Puspaga	190.333.000	
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	73.822.520	100%	74.975.672	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	

Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	73.822.520		74.975.672											DP3AP2KB
monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/ko ta														
2.08.04.2.02 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100%	-	100%	130.000.000	100%	143.000.000	100%	157.300.000	100%	173.030.000	100%	190.333.000	
layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	100.000.000		110.000.000	100 Orang	121.000.000	100 Orang	133.100.000	100 Orang	146.410.000	DP3AP2KB
layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	-		-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	DP3AP2KB
layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan	-		-	100 Orang	-		-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	DP3AP2KB

	konseling Lingkup Kabupaten/K ota														
Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	DP3AP2KB
Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	30.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang	DP3AP2KB
							33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		
5.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	-	1 data	-	1 data	30.000.000	33.000.000	3 data	36.300.000	3 data	39.930.000	5 data	43.923.000		
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2 Laporan	-	2 Laporan	30.000.000	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	39.930.000	2 Laporan	43.923.000		
2.08.05.2.01.0004 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		10 Lembaga	15.000.000	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga	DP3AP2KB
							16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500		
2.08.05.2.01.0005 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan	Jumlah dokumen hasil penguatan	-		2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	16.500.000	2 Dokumen	18.150.000	2 Dokumen	19.965.000	2 Dokumen	21.961.500		DP3AP2KB

terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA														
6.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	84.452.763	75%	49.999.886	75%	240.000.000	77%	264.000.000	77%	290.400.000	80%	319.440.000	80%	351.384.000	
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 Lembaga	-	10 Lembaga	120.000.000	10 Lembaga	132.000.000	10 Lembaga	145.200.000	10 Lembaga	159.720.000	10 Lembaga	175.692.000	
2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.08.06.2.01.0004 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak			-	100 Orang	30.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	

Kabupaten/Kota	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
2.08.06.2.01.0005 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000	43.923.000	
2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000	43.923.000	
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	84.452.763	5 Lembaga	49.999.886	10 Lembaga	120.000.000	10 Lembaga	132.000.000	10 Lembaga	145.200.000	10 Lembaga	159.720.000	10 Lembaga	175.692.000

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		44.996.519	1 Lembaga	49.999.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		39.456.244		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	-		-	100 Orang	50.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang	DP3AP2KB
								55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000
2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	DP3AP2KB
								38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500
2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	10 Lembaga	35.000.000	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga	DP3AP2KB
								38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500
2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan	jumlah dokumen hasil monitoring	-		-	2 Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	DP3AP2KB
								-		-		-	-	

pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	-		-	10 Lembaga	-	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		DP3AP2KB
7.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	- Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus - Mendapatkan Layanan Komprehensif - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	569.607.151	100%	379.987.740	100%	900.000.000	100%	990.000.000	100%	1.089.000.000	100%	1.197.900.000	100%	1.317.690.000	
			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			71%		73%		73%		75%		75%		75%		
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	74.044.404	100%	49.999.661	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000	
2.08.06.2.02.0006 Penguatan kerja sama lintas perangkat kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak daerah untuk Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan		74.044.404		49.999.661											DP3AP2KB

DRPPA														
2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	-	-	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		DP3AP2KB
							44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	
2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	-	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DP3AP2KB
							-		-		-		-	
2.08.07.2.01.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	-	-	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		DP3AP2KB
							16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500	
2.08.07.2.01.0009 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	-	-	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		DP3AP2KB
							16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500	
2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	-	-	100 Orang	25.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		DP3AP2KB
							27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	
2.08.07.2.01.0010 Penyusunan kebijakan pencegahan	Jumlah kebijakan pencegahan	-	-	1 Kebijakan	15.000.000	1 Kebijakan	16.500.000	1 Kebijakan	18.150.000	1 Kebijakan	19.965.000	1 Kebijakan	21.961.500	DP3AP2KB

pengecahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota														
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	30.000.000	100%	30.000.000	100%	260.000.000	100%	286.000.000	100%	314.600.000	100%	346.060.000	100%	380.666.000	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	10 Orang	30.000.000		-		-		-		-		-	DP3AP2KB
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	30.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	30.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.08.07.2.02.0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	15.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		DP3AP2KB
								16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500	

2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	15.000.000	100 Orang	16.500.000	100 Orang	18.150.000	100 Orang	19.965.000	100 Orang	21.961.500	DP3AP2KB
2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	121.000.000	100 Orang	133.100.000	100 Orang	146.410.000	DP3AP2KB
2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	30.000.000	100 Orang	33.000.000	100 Orang	36.300.000	100 Orang	39.930.000	100 Orang	43.923.000	DP3AP2KB
2.08.07.2.02.0014 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	20.000.000	100 Orang	22.000.000	100 Orang	24.200.000	100 Orang	26.620.000	100 Orang	29.282.000	DP3AP2KB
2.08.07.2.02.0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban	-	-	100 Orang	20.000.000	100 Orang	22.000.000	100 Orang	24.200.000	100 Orang	26.620.000	100 Orang	29.282.000	DP3AP2KB

	Tingkat Kabupaten/Kota														
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	465.562.747	75%	299.988.079	77%	530.000.000	77%	583.000.000	80%	641.300.000	80%	705.430.000	85%	775.973.000	
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota		420.613.597	1 Lembaga	250.000.000		-		-		-		-		-	DP3AP2KB
Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		44.949.150	10 Orang	49.988.079		-		-		-		-		-	DP3AP2KB
2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	-		-	2 Dokumen	-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		DP3AP2KB
2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	-		-	2 Dokumen	-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		DP3AP2KB
2.08.07.03.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan	-		-	2 Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		DP3AP2KB

yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	-	DP3AP2KB
2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	36.300.000	2 Dokumen	39.930.000	2 Dokumen	43.923.000	DP3AP2KB	
2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	500.000.000	100 Orang	550.000.000	100 Orang	605.000.000	100 Orang	665.500.000	100 Orang	732.050.000	DP3AP2KB	

	ota yang mendapatkan bimtek														
2.08.07.2.03.0014	jumlah lembaga penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	10 Lembaga	-	10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		DP3AP2KB
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.420.564.665		3.846.355.897		2.100.000.000		2.310.000.000		2.541.000.000		2.795.100.000		3.074.610.000	
8.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) - Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility)	49.998.403	2.48	129.997.671	2.35	850.000.000	1.97	935.000.000	1.87	1.028.500.000	1.65	1.131.350.000	1,5	1.244.485.000	
			40.5		40.1		39.7		38.7		35.1		33.3		
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	49.998.403	100%	129.997.671	100%	360.000.000	100%	396.000.000	100%	435.600.000	100%	479.160.000	100%	527.076.000	
2.14.02.2.01.0016	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	-		-	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DP3AP2KB
								27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	

	Binaan													
2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-	1 Kegiatan	19.999.278	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000	1 Kegiatan	24.200.000	1 Kegiatan	26.620.000	29.282.000	DP3AP2KB
2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000	1 Kegiatan	24.200.000	1 Kegiatan	26.620.000	29.282.000	DP3AP2KB
2.14.02.2.01.0025 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	49.998.403	1 Dokumen	59.999.272	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	73.205.000	DP3AP2KB
2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	-	1 Satuan Pendidikan	9.999.612	1 Satuan Pendidikan	30.000.000	1 Satuan Pendidikan	33.000.000	1 Satuan Pendidikan	36.300.000	1 Satuan Pendidikan	39.930.000	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.02.2.01.0028 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan	-		-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	39.930.000	43.923.000	DP3AP2KB

kepada Pemangku Kepentingan	an Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
2.14.02.2.01.0029 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	-	-	1 Kabupaten/Kota	30.000.000	1 Kabupaten/Kota	33.000.000	1 Kabupaten/Kota	36.300.000	1 Kabupaten/Kota	39.930.000	1 Kabupaten/Kota	43.923.000	DP3AP2KB	
2.14.02.2.01.0030 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-	-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	39.930.000	2 Laporan	43.923.000	DP3AP2KB	
2.14.02.2.01.0033 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	39.999.509	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	36.300.000	2 Dokumen	39.930.000	2 Dokumen	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.02.2.01.0032 Pelaksanaan	Jumlah Survei/Penda	-	-	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	42.350.000	2 Dokumen	46.585.000	2 Dokumen	51.243.500	DP3AP2KB	

Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	taan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				n	00	n	00	n	00	n	00	n		
2.14.02.2.01.0033 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.02.2.01.0034 Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	33 Perangkat Daerah	30.000.000	33 Perangkat Daerah		33 Perangkat Daerah		33 Perangkat Daerah		33 Perangkat Daerah		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100%	-	100%	490.000.000	100%	539.000.000	100%	592.900.000	100%	652.190.000	100%	717.409.000	
2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	-		-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		DP3AP2KB
								55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	

Keluarga	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-	-	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	49.500.000	2 Dokumen	54.450.000	2 Dokumen	59.895.000	2 Dokumen	65.884.500	DP3AP2KB
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-	-	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	49.500.000	2 Dokumen	54.450.000	2 Dokumen	59.895.000	2 Dokumen	65.884.500	DP3AP2KB
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	49.500.000	2 Laporan	54.450.000	2 Laporan	59.895.000	2 Laporan	65.884.500	DP3AP2KB
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	42.350.000	2 Dokumen	46.585.000	2 Dokumen	51.243.500	DP3AP2KB
2.14.02.2.02.0016 Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	-	-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	39.930.000	2 Laporan	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	-	-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	39.930.000	2 Laporan	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.02.2.02.0022 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	-	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	36.300.000	2 Dokumen	39.930.000	2 Dokumen	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.02.2.02.0023 Penyediaan dan	Jumlah Dokumen	-	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	36.300.000	2 Dokumen	39.930.000	2 Dokumen	43.923.000	DP3AP2KB

Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				n	00	n	00	n	00	n	00	n		
2.14.02.2.02.0024 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	-	-	2	Dokumen	30.000.000	2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.02.2.02.0025 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	-	-	2	Dokumen	30.000.000	2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.02.2.02.0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	-	-	1	Unit	30.000.000	1	Unit		1	Unit		1	Unit	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.02.2.02.0027 Penyusunan Profil program Pembangunan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	-	-	2	Dokumen	30.000.000	2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen	DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	an, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga														
2.14.02.2.02.0028 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-		-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
9.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) - Persentase Kebutuhan berKB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	1.679.453.081	77%	2.289.994.534	81%	800.000.000	83%	880.000.000	85%	968.000.000	87%	1.064.800.000	89%	1.171.280.000	
			15.67		15.67		14,35			13.65		12,75	11.55		
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	541.000.000	100%	511.976.000	100%	175.000.000	100%	192.500.000	100%	211.750.000	100%	232.925.000	100%	256.217.500	
2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-		-	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		DP3AP2KB
								27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	
2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusi-an KIE Program Bangga Kencana (Pembangun	210.000.000	10 Unit	158.376.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		DP3AP2KB
								27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	

	an Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)														
2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	256.000.000	2 Laporan	253.600.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	27.500.000	2 Laporan	30.250.000	2 Laporan	33.275.000	2 Laporan	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	75.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	27.500.000	2 Laporan	30.250.000	2 Laporan	33.275.000	2 Laporan	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui	-		-	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	27.500.000	2 Dokumen	30.250.000	2 Dokumen	33.275.000	2 Dokumen	36.602.500	DP3AP2KB

	Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-	-	-	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	27.500.000	2 Dokumen	30.250.000	2 Dokumen	33.275.000	2 Dokumen	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	-	10 Organisasi	25.000.000	10 Organisasi	27.500.000	10 Organisasi	30.250.000	10 Organisasi	33.275.000	10 Organisasi	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	277.200.000	100%	32.400.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000	100%
2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	-	-	-	10 Unit	25.000.000	10 Unit	27.500.000	10 Unit	30.250.000	10 Unit	33.275.000	10 Unit	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti	277.200.000	100 Orang	32.400.000	100 Orang	25.000.000	100 Orang	27.500.000	100 Orang	30.250.000	100 Orang	33.275.000	100 Orang	36.602.500	DP3AP2KB

Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-		-	10 Organisasi	30.000.000	10 Organisasi	33.000.000	10 Organisasi	36.300.000	10 Organisasi	39.930.000	43.923.000	DP3AP2KB	
2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-		-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	39.930.000	43.923.000	DP3AP2KB	
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	-	809.003.081	100%	1.225.818.534	100%	425.000.000	100%	467.500.000	100%	514.250.000	100%	565.675.000	622.242.500		

serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota															
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	69.300.000	2 Laporan	90.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	27.500.000	2 Laporan	30.250.000	2 Laporan	33.275.000	2 Laporan	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	553.253.000	100 Orang	222.824.000	100 Orang	25.000.000	100 Orang	27.500.000	100 Orang	30.250.000	100 Orang	33.275.000	100 Orang	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-		-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	49.997.461		-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.500.000	2 Dokumen	66.550.000	2 Dokumen	73.205.000	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	112.552.620	10 Unit	893.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	55.000.000	10 Unit	60.500.000	10 Unit	66.550.000	10 Unit	73.205.000	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0007	Jumlah				100		100		100		100		100		DP3AP2KB

Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	-		-	Orang	50.000.000	Orang	55.000.000	Orang	60.500.000	Orang	66.550.000	Orang	73.205.000	
2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.900.000		-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	66.550.000	2 Laporan	73.205.000	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-		-	100 Orang	30.000.000	100 Orang	33.000.000	100 Orang	36.300.000	100 Orang	39.930.000	100 Orang	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	-	2 Laporan	19.994.534	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	39.930.000	2 Laporan	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	-		-	100 Orang	25.000.000	100 Orang	27.500.000	100 Orang	30.250.000	100 Orang	33.275.000	100 Orang	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola	-		-	100 Orang	30.000.000	100 Orang	33.000.000	100 Orang	36.300.000	100 Orang	39.930.000	100 Orang	43.923.000	DP3AP2KB

KB	dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	-		-	100 Orang	30.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.03.2.03.0017 Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-		-	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	52.250.000	100%	519.800.000	100%	90.000.000	100%	99.000.000	100%	108.900.000	100%	119.790.000	100%	131.769.000	
2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-		-	5 Unit	30.000.000	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	52.250.000	20 Kampung	519.800.000	20 Kampung	30.000.000	54 Kampung		54 Kampung		54 Kampung		54 Kampung		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	

	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)														
2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-		-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
10.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	1.691.113.181	81%	1.426.363.692	83%	450.000.000	83%	495.000.000	85%	544.500.000	85%	598.950.000	87%	658.845.000	
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1.612.800.000	100%	1.344.600.000	100%	375.000.000	100%	412.500.000	100%	453.750.000	100%	499.125.000	100%	549.037.500	
2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	100 Keluarga	30.000.000	100 Keluarga		100 Keluarga		100 Keluarga		100 Keluarga		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.04.2.01.0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan	-		-	2 Laporan / Dokumen	30.000.000	2 Laporan / Dokumen	33.000.000	2 Laporan / Dokumen	36.300.000	2 Laporan / Dokumen	39.930.000	2 Laporan / Dokumen	43.923.000	DP3AP2KB

Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				n		n		n		n		n	
2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		DP3AP2KB
							33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	-	10 Unit	30.000.000	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		DP3AP2KB
							33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdaya	-	-	100 Orang	30.000.000	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		DP3AP2KB
							33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	

	an Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-	-	100 Orang	30.000.000	100 Orang	33.000.000	100 Orang	36.300.000	100 Orang	39.930.000	100 Orang	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-	-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	39.930.000	2 Laporan	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	36.300.000	2 Dokumen	39.930.000	2 Dokumen	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	-	-	100 Orang	30.000.000	100 Orang	33.000.000	100 Orang	36.300.000	100 Orang	39.930.000	100 Orang	43.923.000	DP3AP2KB

BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan														
2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-		-	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	16.500.000	2 Laporan	18.150.000	2 Laporan	19.965.000	2 Laporan	21.961.500	DP3AP2KB
2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1.612.800.000	54 Kelompok	1.344.600.000	54 Kelompok	30.000.000	54 Kelompok	33.000.000	54 Kelompok	36.300.000	54 Kelompok	39.930.000	54 Kelompok	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.04.2.01.0027 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-		-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	DP3AP2KB

2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	-		-	54 Kelompok	30.000.000	54 Kelompok		54 Kelompok		54 Kelompok		54 Kelompok		DP3AP2KB
								33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
2.14.04.2.01.0029 Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-		-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	DP3AP2KB
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	78.313.181	100%	81.763.692	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.807.500	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan		50.993.861	1 Kegiatan	50.998.301		-		-		-		-		-	DP3AP2KB

Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		27.319.320	1 Kegiatan	30.765.391	-									DP3AP2KB
2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	2 laporan	25.000.000	2 laporan	27.500.000	2 laporan	30.250.000	2 laporan	33.275.000	2 laporan	36.602.500	DP3AP2KB
2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	-	2 laporan	30.000.000	2 laporan	33.000.000	2 laporan	36.300.000	2 laporan	39.930.000	2 laporan	43.923.000	DP3AP2KB
2.14.04.2.02.00007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja	-	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	DP3AP2KB

dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga															
2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-	-	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan		22.000.000	2 Laporan		24.200.000	2 Laporan		26.620.000	29.282.000	DP3AP2KB

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Kegiatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	

4.5 Target pencapaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Tabel 4.5

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	66,45	69,77	73,26	76,92	80,77	84,81	
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	
3.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	95,55	96,00	96,55	97,00	97,55	98,00	
4.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	62.47- 62.47	63.73- 63.73	64.00- 64.00	65.26- 65.26	66.53- 66.53	67.79- 67.79	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	5%	5.22%	5,25%	5.29%	5.66%	5.69%	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persentase	55%	56%	57%	58%	59%	60%	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
4	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standard	Indeks	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan	Persentase	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	90%	92%	93%	94%	95%	96%	
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	95.55	96	96.55	97	97.55	98.00	
9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Orang	2.65	2.66	2.66	2.65	2.65	2.64	

10.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (<i>Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19.3-19.3	18.6-18.6	18.1-18.1	17.6-17.6	17.2-17.2	16.9-16.9	
11	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	Persentase	46.78%	49.30%	50.80%	51.20%	53.00%	53.80%	
12	Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persentase	24.80%	23.65%	22.50%	21.00%	20.50%	20%	
13.	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

14.	Indeks Pembangunan Keluarga (i- Bangga)	Indeks	62.47: 62.47	63.73:6 3.73	64:64	65.26:6 5.26	66.53:6 6.53	67.79:6 7.79	
-----	--	--------	-----------------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	-----------------	--

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



AGUSTINA NASUTION, SE, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660808 198803 2 003